



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 5791-5800

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Analisis Kebijakan Ekonomi Publik dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Elviani, Hendra Riofita

Program Studi Pendidikan ekonomi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam negeri Sultan Syarif Kasim Riau
nielvi757@gmail.com, hendrariofita@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan karena kebijakan ekonomi publik berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia, khususnya dalam menghadapi masalah ketimpangan pembangunan, rendahnya efektivitas pengelolaan keuangan daerah, serta terbatasnya kapasitas fiskal pemerintah daerah. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi fungsi kebijakan ekonomi publik dalam mendorong pertumbuhan ekonomi regional, mengidentifikasi alat kebijakan yang diterapkan pemerintah, menganalisis pengaruhnya terhadap perkembangan ekonomi daerah, serta mengetahui beragam tantangan dan strategi untuk mengoptimalkan kebijakan tersebut. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif melalui metode tinjauan pustaka. Informasi dikumpulkan dari jurnal akademik, buku, dokumen resmi, dan berbagai referensi yang berkaitan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis isi melalui pengkajian, perbandingan, dan interpretasi teori serta temuan penelitian yang telah ada sebelumnya. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa kebijakan fiskal lokal, desentralisasi fiskal, pembangunan infrastruktur, investasi publik, dana transfer dari pemerintah pusat, serta pengembangan ekonomi digital berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dengan cara meningkatkan produktivitas masyarakat, kegiatan ekonomi, dan pemerataan pembangunan. Namun, penerapan kebijakan tetap menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kemandirian fiskal daerah, lemahnya pengelolaan pemerintahan, disparitas pembangunan antar wilayah, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan publik yang belum optimal. Penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan Pendapatan Asli Daerah, perbaikan kualitas pengelolaan pemerintahan, optimalisasi layanan publik berbasis digital, serta kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah harus terus ditingkatkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, merata, dan berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat daya saing ekonomi daerah.

Kata kunci: Kebijakan Ekonomi Publik, Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Pembangunan Daerah, Kebijakan Fiskal.

1. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi daerah merupakan salah satu indikator utama dalam menilai keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. Dalam konteks global, kebijakan ekonomi publik semakin dipandang sebagai instrumen strategis untuk menciptakan pemerataan pembangunan, meningkatkan daya saing daerah, serta memperkuat ketahanan ekonomi di tengah ketidakpastian ekonomi dunia. Berbagai negara berkembang menghadapi tantangan berupa ketimpangan antarwilayah, rendahnya kualitas infrastruktur, dan keterbatasan investasi publik yang berdampak pada lambatnya pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk merumuskan kebijakan ekonomi publik yang efektif, adaptif, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Di Indonesia, implementasi kebijakan ekonomi publik telah dilakukan melalui berbagai program seperti desentralisasi fiskal, pembangunan infrastruktur daerah, pemberian dana transfer daerah, serta penguatan sektor usaha mikro dan menengah. Namun, realitas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi antar daerah masih mengalami ketimpangan yang cukup signifikan. Beberapa daerah mampu tumbuh dengan cepat karena dukungan investasi dan kebijakan yang tepat, sementara daerah lain masih menghadapi persoalan rendahnya produktivitas, tingginya tingkat pengangguran, serta terbatasnya kualitas pelayanan publik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan ekonomi publik dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah belum berjalan secara optimal dan masih memerlukan evaluasi yang komprehensif.

Permasalahan utama yang muncul adalah adanya perbedaan hasil implementasi kebijakan ekonomi publik di setiap daerah. Penelitian terdahulu umumnya lebih banyak berfokus pada pengaruh variabel ekonomi makro seperti

investasi, inflasi, dan pendapatan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan kajian yang secara khusus menganalisis efektivitas kebijakan ekonomi publik sebagai instrumen pembangunan daerah masih relatif terbatas. Selain itu, sebagian penelitian cenderung menggunakan pendekatan kuantitatif dengan penekanan pada aspek statistik, sehingga belum banyak mengungkap bagaimana kebijakan publik diterapkan, direspons, dan memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Kesenjangan penelitian tersebut menunjukkan perlunya kajian yang lebih mendalam mengenai hubungan antara kebijakan ekonomi publik dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan karena dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran kebijakan ekonomi publik dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian ini diharapkan mampu mengidentifikasi bentuk kebijakan yang efektif, faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan, serta dampaknya terhadap pembangunan ekonomi daerah. Selain memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan kajian ekonomi publik, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran, berkeadilan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka untuk menganalisis kebijakan ekonomi publik dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Data penelitian bersumber dari jurnal ilmiah, buku, dokumen pemerintah, dan berbagai literatur yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan penelusuran literatur, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi dengan mengkaji, membandingkan, dan menginterpretasikan berbagai teori serta hasil penelitian terdahulu guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai peran kebijakan ekonomi publik terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

3. Hasil dan Diskusi

Konsep Kebijakan Ekonomi Publik

Kebijakan ekonomi publik merupakan serangkaian keputusan dan tindakan pemerintah yang dirancang untuk mengatur aktivitas ekonomi guna mencapai tujuan pembangunan nasional maupun daerah. Kebijakan ini mencakup pengelolaan fiskal, distribusi anggaran, pembangunan infrastruktur, subsidi, investasi publik, serta regulasi ekonomi yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif ekonomi pembangunan, kebijakan publik memiliki peran penting dalam menciptakan stabilitas ekonomi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan produktivitas daerah. Menurut Basuki (2020), kebijakan fiskal pemerintah daerah melalui belanja pendidikan, kesehatan, dan sektor produktif memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, meskipun efektivitasnya masih dipengaruhi kualitas pengelolaan anggaran dan tata kelola pemerintahan.

Secara teoritis, kebijakan ekonomi publik lahir dari kebutuhan negara untuk mengatasi kegagalan pasar (market failure) yang tidak mampu diselesaikan oleh mekanisme ekonomi secara alami. Pemerintah hadir sebagai aktor utama yang mengendalikan distribusi sumber daya agar pembangunan ekonomi tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada pemerataan kesejahteraan sosial. Dalam buku *Public Policy Analysis* karya Dunn dijelaskan bahwa kebijakan publik merupakan pola tindakan pemerintah yang dibuat untuk memecahkan masalah publik melalui proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan (Dunn, 2016). Konsep ini menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi publik tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai alat pengendali pembangunan sosial dan regional.

Dalam perkembangan ekonomi modern, kebijakan ekonomi publik tidak hanya berfokus pada pengelolaan anggaran dan pembangunan ekonomi, tetapi juga pada penguatan tata kelola, regulasi, dan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah dituntut untuk menciptakan kebijakan yang transparan, adaptif, dan mampu menjawab perubahan ekonomi digital yang terus berkembang. Hal tersebut sejalan dengan penelitian dalam artikel *Developing Digital Empowerment Programs* yang menyatakan bahwa “*The beneficial transparent solutions relate to the financial, human resource, and regulatory aspects*”. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan ekonomi publik sangat dipengaruhi oleh kualitas regulasi, kapasitas sumber daya manusia, serta sistem

pengelolaan ekonomi yang transparan guna mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan Riofita (2024).

Dalam konteks pembangunan daerah, kebijakan ekonomi publik erat kaitannya dengan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah. Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya ekonomi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah masing-masing. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mempercepat pembangunan ekonomi daerah melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta penguatan sektor unggulan daerah. Penelitian oleh Rahman, Sakti, and Thompson (2026) menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal menjadi instrumen penting dalam strategi pembangunan daerah di Indonesia karena mampu meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Kebijakan ekonomi publik juga berkaitan dengan pengelolaan anggaran pemerintah melalui kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal mencakup pengaturan penerimaan dan pengeluaran negara atau daerah untuk memengaruhi kondisi ekonomi masyarakat. Dalam praktiknya, kebijakan fiskal daerah diwujudkan melalui belanja pemerintah, transfer daerah, dana desa, serta pembangunan sektor produktif. Prasetyo and Dinarjito (2021) menjelaskan bahwa dana desa dan indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia karena mampu meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat dan kualitas sumber daya manusia.

Selain kebijakan fiskal, pembangunan infrastruktur publik juga menjadi bagian penting dalam kebijakan ekonomi publik. Infrastruktur seperti jalan, listrik, air bersih, dan fasilitas publik lainnya memiliki hubungan erat dengan peningkatan produktivitas ekonomi daerah. Infrastruktur yang memadai mampu memperlancar distribusi barang dan jasa, meningkatkan investasi, serta membuka akses ekonomi masyarakat. Luthfi, Bashir, and Sukanto (2024) menyatakan bahwa infrastruktur publik memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah karena menjadi penunjang utama aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha.

Pada tingkat global, kebijakan ekonomi publik tidak hanya diarahkan pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga pada pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah di berbagai negara mulai menekankan pentingnya kebijakan berbasis wilayah (*place-based policy*) untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah. Penelitian dalam *Regional Science and Urban Economics* menunjukkan bahwa intervensi kebijakan pembangunan wilayah mampu meningkatkan kesejahteraan regional apabila dilakukan secara terarah dan sesuai dengan kebutuhan lokal masyarakat Ferrara et al. (2022).

Di Indonesia, implementasi kebijakan ekonomi publik masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketimpangan pembangunan antarwilayah, rendahnya efektivitas belanja daerah, serta ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap transfer pusat. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan ekonomi publik tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh kualitas implementasi dan pengawasan kebijakan. Kusuma and Anwar (2023) menjelaskan bahwa ketergantungan fiskal daerah masih menjadi persoalan utama dalam pembangunan ekonomi daerah karena sebagian besar daerah belum mampu mengoptimalkan pendapatan asli daerah secara mandiri.

Lebih lanjut, kebijakan ekonomi publik juga berperan dalam menciptakan iklim investasi dan pengembangan kawasan ekonomi strategis. Pemerintah berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, dan pembangunan pusat pertumbuhan baru. Sa'diah and Khoirunurrofik (2025) menjelaskan bahwa kawasan ekonomi khusus memiliki hubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat karena mampu menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan aktivitas ekonomi regional.

Berdasarkan berbagai konsep dan hasil penelitian tersebut, dapat dipahami bahwa kebijakan ekonomi publik merupakan instrumen strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali ekonomi, tetapi juga sebagai sarana pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan ekonomi publik perlu terus dievaluasi agar implementasinya mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah secara optimal, berkelanjutan, dan inklusif.

Konsep Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Pertumbuhan ekonomi daerah merupakan proses peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa dalam suatu wilayah yang ditunjukkan melalui kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari waktu ke waktu. Pertumbuhan ekonomi daerah menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan suatu wilayah karena berkaitan dengan peningkatan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, dan kesejahteraan sosial. Abdillah, Maulana, and Aminatuzzuhro (2023) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya ekonomi secara efektif melalui peningkatan produktivitas dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Secara teoritis, konsep pertumbuhan ekonomi daerah berakar pada teori pertumbuhan ekonomi yang menekankan pentingnya akumulasi modal, tenaga kerja, teknologi, dan inovasi dalam meningkatkan output ekonomi wilayah. Dalam ebook *Economic Development* karya Todaro dan Smith dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan proses peningkatan output per kapita dalam jangka panjang yang disertai perubahan struktur ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Todaro and Smith (2006). Konsep ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah tidak hanya dilihat dari peningkatan angka statistik ekonomi, tetapi juga dari perubahan sosial dan peningkatan kualitas pembangunan daerah.

Dalam konteks pembangunan regional, pertumbuhan ekonomi daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti investasi, infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, dan kapasitas fiskal daerah. Infrastruktur yang memadai mampu memperlancar distribusi barang dan jasa sehingga meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat. Maudita and Susilo (2023) menjelaskan bahwa infrastruktur jalan, tenaga kerja, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah karena mendukung kelancaran aktivitas ekonomi regional.

Selain infrastruktur, investasi juga menjadi faktor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Investasi mampu meningkatkan kapasitas produksi, membuka lapangan kerja, dan memperkuat aktivitas industri di suatu wilayah. Saputri and Ananda (2023) menyatakan bahwa belanja daerah, penanaman modal dalam negeri, dan penanaman modal asing memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi karena mampu meningkatkan aktivitas produksi dan pembangunan sektor ekonomi daerah.

Pertumbuhan ekonomi daerah juga berkaitan erat dengan desentralisasi fiskal dan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur kebijakan pembangunan sesuai dengan potensi dan kebutuhan wilayah masing-masing. Rahman, Sakti, and Thompson (2026) menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal menjadi instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi regional karena memberikan fleksibilitas bagi daerah dalam menentukan prioritas pembangunan ekonomi lokal.

Dalam perspektif global, pertumbuhan ekonomi daerah juga dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi dan transformasi sektor produktif. Perpindahan aktivitas ekonomi dari sektor tradisional menuju sektor industri dan jasa modern mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah. Andriansyah, Asep, and Rifai (2023) menjelaskan bahwa perubahan struktur ekonomi memiliki hubungan dengan pertumbuhan ekonomi regional, terutama ketika terjadi peningkatan produktivitas dalam sektor-sektor ekonomi unggulan daerah.

Di Indonesia, pertumbuhan ekonomi daerah masih menghadapi tantangan berupa ketimpangan pembangunan antarwilayah, rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. Kondisi tersebut menyebabkan kemampuan pertumbuhan ekonomi setiap daerah menjadi berbeda-beda. Prasetyo and Dinarjito (2021) menjelaskan bahwa kualitas pembangunan manusia dan pengelolaan dana desa memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional karena mampu meningkatkan produktivitas masyarakat dan aktivitas ekonomi lokal.

Berdasarkan berbagai konsep dan hasil penelitian tersebut, dapat dipahami bahwa pertumbuhan ekonomi daerah merupakan proses peningkatan aktivitas ekonomi wilayah yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kebijakan pemerintah, investasi, infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, dan kapasitas fiskal daerah. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi daerah tidak hanya bergantung pada potensi sumber daya alam, tetapi juga pada kemampuan pemerintah daerah dalam merancang kebijakan pembangunan yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

Instrumen Kebijakan Ekonomi Publik dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Instrumen kebijakan ekonomi publik merupakan seperangkat kebijakan yang digunakan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk mendorong aktivitas ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam konteks Indonesia, instrumen tersebut meliputi kebijakan fiskal daerah, belanja pemerintah, dana transfer pusat, pembangunan infrastruktur publik, hingga kebijakan desentralisasi fiskal. Penerapan instrumen kebijakan ekonomi publik menjadi penting karena pertumbuhan ekonomi daerah tidak hanya ditentukan oleh aktivitas pasar, tetapi juga oleh kapasitas pemerintah dalam menciptakan iklim pembangunan yang produktif dan berkelanjutan. Penelitian oleh Ihwandi and Khoirunurrofik (2023) menjelaskan bahwa kinerja keuangan daerah memiliki hubungan erat dengan pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia. Penelitian tersebut juga menyatakan bahwa “regional financial performance significantly influences inclusive economic development”, yang menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan fiskal daerah dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pembangunan.

Salah satu instrumen utama kebijakan ekonomi publik adalah kebijakan fiskal daerah melalui pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Instrumen ini digunakan untuk memperkuat kapasitas pembiayaan pembangunan daerah, terutama pada sektor-sektor produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan publik. Penelitian oleh Nabila et al. (2025) menjelaskan bahwa PAD, DAU, dan DAK memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan kapasitas fiskal pemerintah daerah. Dalam penelitian tersebut juga menyebutkan bahwa “penguatan kemandirian fiskal dan peningkatan efektivitas pengelolaan transfer pusat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata”. Temuan tersebut menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal memberi ruang bagi daerah untuk mengoptimalkan sumber daya lokal demi mempercepat pembangunan ekonomi.

Selain kebijakan fiskal, belanja daerah juga menjadi instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Belanja pemerintah daerah yang diarahkan pada pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan penguatan sektor produktif mampu meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Penelitian oleh Sugandi, Nariyah, and Nursahidin (2024) menunjukkan bahwa kebijakan belanja daerah memiliki pengaruh positif terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indramayu.

Selain kebijakan fiskal dan pembangunan infrastruktur, transformasi ekonomi digital juga menjadi instrumen penting dalam kebijakan ekonomi publik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satu bentuk implementasinya adalah pengembangan *Sharia Fintech* dan *marketplace* syariah yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat secara digital. Dalam artikel yang diteliti oleh Riofita (2024) dijelaskan bahwa “*Sharia marketplaces are online markets provided for Muslim customers to do online shopping. The shopping activities at the Sharia marketplaces should also be supported by an online payment system or Fintech that complies with Islamic law or Sharia*”. Pengembangan instrumen ekonomi digital tersebut dinilai mampu memperluas akses pasar bagi UMKM, meningkatkan efisiensi transaksi ekonomi, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi dan ekonomi syariah di daerah. Selain itu, keberhasilan implementasi kebijakan ekonomi digital juga memerlukan dukungan regulasi, sumber daya manusia yang kompeten, dan sistem pelayanan yang transparan agar mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan layanan keuangan digital.

Instrumen kebijakan ekonomi publik lainnya adalah pembangunan infrastruktur publik. Infrastruktur seperti jalan, listrik, air bersih, dan transportasi menjadi faktor penting dalam meningkatkan konektivitas ekonomi antarwilayah serta memperlancar distribusi barang dan jasa. Penelitian oleh Luthfi, Bashir, and Sukanto (2024) menemukan bahwa infrastruktur publik memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah di Sumatera bagian selatan. Penelitian tersebut menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur mampu meningkatkan produktivitas ekonomi daerah melalui efisiensi distribusi dan peningkatan akses masyarakat terhadap layanan publik. Dengan demikian, investasi pemerintah pada infrastruktur menjadi salah satu instrumen strategis untuk memperkuat daya saing daerah dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Dana transfer pemerintah pusat kepada daerah, seperti dana desa, juga menjadi instrumen kebijakan ekonomi publik yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Dana desa berfungsi sebagai stimulus pembangunan ekonomi berbasis masyarakat melalui pembangunan infrastruktur desa, pemberdayaan UMKM, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Penelitian oleh Prasetyo and Dinarjito (2021) menunjukkan bahwa dana desa dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan transfer fiskal yang tepat sasaran mampu meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat desa dan mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.

Di sisi lain, kebijakan desentralisasi fiskal juga menjadi instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia. Melalui desentralisasi fiskal, pemerintah daerah memperoleh kewenangan yang lebih besar dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran daerah sesuai kebutuhan lokal. Penelitian oleh Rahman, Sakti, and Thompson (2026) menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal dapat meningkatkan efektivitas pembangunan ekonomi daerah karena kebijakan yang diambil lebih sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing. Dengan adanya kewenangan tersebut, pemerintah daerah dapat lebih responsif dalam merancang kebijakan pembangunan ekonomi yang sesuai dengan potensi daerahnya.

Secara keseluruhan, instrumen kebijakan ekonomi publik memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia. Kebijakan fiskal daerah, belanja pemerintah, pembangunan infrastruktur, dana transfer pusat, dan desentralisasi fiskal merupakan instrumen yang saling berkaitan dalam menciptakan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Efektivitas instrumen tersebut sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola pemerintahan, kemampuan pengelolaan anggaran, serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu, optimalisasi kebijakan ekonomi publik menjadi langkah penting untuk memperkuat daya saing daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah di Indonesia.

Analisis Dampak Kebijakan Ekonomi Publik terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Analisis dampak kebijakan ekonomi publik terhadap pertumbuhan ekonomi daerah merupakan kajian penting dalam memahami efektivitas intervensi pemerintah terhadap pembangunan regional. Dalam konteks Indonesia, kebijakan ekonomi publik diwujudkan melalui kebijakan fiskal, pengelolaan anggaran daerah, desentralisasi fiskal, pembangunan infrastruktur, serta reformasi pelayanan publik yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat aktivitas ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah tidak hanya dipengaruhi oleh mekanisme pasar, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya publik secara efektif dan berkelanjutan. Menurut Prasetya (2021), kualitas pengelolaan fiskal daerah memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa “fiscal conditions and regional financial performance have a significant and positive effect on inclusive economic growth”. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang baik dapat meningkatkan pemerataan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara lebih luas.

Salah satu kebijakan ekonomi publik yang memiliki dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah adalah desentralisasi fiskal. Kebijakan ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah masing-masing. Dengan adanya desentralisasi fiskal, pemerintah daerah memiliki fleksibilitas lebih besar dalam menentukan prioritas pembangunan ekonomi, terutama pada sektor produktif seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan UMKM. Penelitian Alvaro (2020) menjelaskan bahwa peningkatan derajat desentralisasi fiskal mampu memperkuat kemandirian keuangan daerah sehingga pemerintah daerah lebih optimal dalam membiayai pembangunan ekonomi regional. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa kapasitas fiskal daerah memiliki hubungan erat dengan kemampuan daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan ekonomi. Dengan demikian, desentralisasi fiskal dapat menjadi instrumen penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah apabila didukung tata kelola pemerintahan yang efektif.

Implementasi kebijakan ekonomi publik berbasis digital memberikan dampak positif terhadap perkembangan ekonomi daerah, khususnya pada sektor UMKM. Pemanfaatan teknologi digital mampu meningkatkan efisiensi pemasaran dan memperluas jangkauan pasar masyarakat. Artikel yang diteliti menyebutkan bahwa “*The success in recommending is a potential to improve business performance at marketplaces and also to assist MSMEs in attracting customers and marketing products*” Riofita (2022). Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi berbasis digital mampu meningkatkan daya saing UMKM serta memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat daerah.

Selain desentralisasi fiskal, kebijakan investasi publik juga memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia. Pemerintah berupaya meningkatkan investasi melalui pembangunan infrastruktur, penyediaan fasilitas publik, dan pemberian stimulus ekonomi guna memperkuat aktivitas sektor riil. Kebijakan investasi publik memiliki pengaruh terhadap peningkatan produksi daerah, penyerapan tenaga kerja, dan pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat. Penelitian Nugroho and Hidayat (2024) menjelaskan bahwa investasi publik dan pembangunan infrastruktur memiliki hubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah di Kalimantan Timur. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa pembangunan infrastruktur jalan dan investasi

publik mampu meningkatkan aktivitas ekonomi daerah melalui peningkatan konektivitas dan produktivitas masyarakat. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan investasi publik dapat menciptakan efek multiplier terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan daya saing dan efisiensi ekonomi regional.

Dampak kebijakan ekonomi publik juga terlihat pada pengembangan sektor infrastruktur ekonomi dan investasi asing yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional maupun regional. Pemerintah daerah dan pemerintah pusat terus mendorong pembangunan infrastruktur ekonomi, sosial, dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas serta memperkuat daya tarik investasi. Infrastruktur yang memadai dapat memperlancar distribusi barang dan jasa, memperluas akses ekonomi masyarakat, serta meningkatkan efisiensi kegiatan produksi di daerah. Ferdian and Satrianto (2022) menjelaskan bahwa infrastruktur ekonomi, sosial, dan foreign direct investment (FDI) memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa pembangunan infrastruktur jalan, listrik, telekomunikasi, dan pendidikan mampu meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan infrastruktur dan peningkatan investasi menjadi strategi penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Kebijakan reformasi regulasi dan pelayanan publik juga memberikan dampak penting terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah daerah yang mampu menciptakan sistem pelayanan publik yang cepat, transparan, dan efisien cenderung lebih berhasil menarik investor dan meningkatkan aktivitas ekonomi wilayahnya. Reformasi birokrasi melalui pelayanan terpadu satu pintu, digitalisasi administrasi, dan penyederhanaan izin usaha menjadi langkah strategis dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Penelitian Maula and Prasajo (2021) menjelaskan bahwa reformasi regulasi pelayanan perizinan di Indonesia berpengaruh terhadap peningkatan efektivitas tata kelola pemerintahan daerah dan daya tarik investasi. Penelitian tersebut menegaskan bahwa koordinasi kelembagaan dan konsistensi kebijakan pemerintah menjadi faktor penting dalam keberhasilan reformasi pelayanan publik.

Meskipun demikian, dampak kebijakan ekonomi publik terhadap pertumbuhan ekonomi daerah tidak selalu berjalan secara merata. Perbedaan kapasitas fiskal, kualitas sumber daya manusia, serta kemampuan tata kelola pemerintahan menyebabkan hasil pembangunan ekonomi antar daerah di Indonesia masih menunjukkan ketimpangan. Beberapa daerah mampu tumbuh lebih cepat karena memiliki dukungan investasi dan infrastruktur yang memadai, sedangkan daerah lain masih menghadapi keterbatasan pembangunan dan rendahnya kapasitas ekonomi lokal. Oleh sebab itu, analisis dampak kebijakan ekonomi publik perlu mempertimbangkan aspek efektivitas kebijakan, pemerataan pembangunan, dan keberlanjutan ekonomi daerah. Kebijakan ekonomi publik yang tepat sasaran akan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah di Indonesia.

Tantangan dan Optimalisasi Kebijakan Ekonomi Publik di Daerah

Tantangan dan optimalisasi kebijakan ekonomi publik di daerah menjadi isu penting dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi di Indonesia, terutama sejak diterapkannya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Kebijakan ekonomi publik pada dasarnya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan anggaran, pembangunan infrastruktur, peningkatan investasi, serta pelayanan publik yang efektif. Namun, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai hambatan, seperti ketimpangan kapasitas fiskal antar daerah, rendahnya kualitas sumber daya manusia birokrasi, serta tingginya ketergantungan daerah terhadap transfer pemerintah pusat. Penelitian Latifa et al. (2025) menjelaskan bahwa tantangan utama dalam desentralisasi fiskal di Indonesia adalah dominasi belanja rutin daerah, terutama belanja pegawai, yang menyebabkan terbatasnya alokasi anggaran untuk pembangunan strategis dan pelayanan publik. Selain itu, tingginya ketergantungan terhadap Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) menunjukkan masih lemahnya kemandirian fiskal daerah.

Salah satu tantangan utama kebijakan ekonomi publik di daerah adalah rendahnya kemampuan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Banyak pemerintah daerah masih mengandalkan transfer fiskal dari pemerintah pusat sehingga kemampuan pembiayaan pembangunan menjadi terbatas. Ketergantungan tersebut menyebabkan daerah kurang fleksibel dalam menentukan prioritas pembangunan ekonomi sesuai potensi lokal. Penelitian Kanan, Lambe, and Lamba (2025) menjelaskan bahwa optimalisasi PAD di Kabupaten Yahukimo masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya efektivitas pemungutan pajak daerah, serta belum optimalnya digitalisasi layanan perpajakan daerah. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa meskipun pemerintah daerah telah menerapkan kebijakan intensifikasi dan

ekstensifikasi pajak, implementasinya masih belum berjalan maksimal akibat keterbatasan kapasitas kelembagaan daerah. DOI: <https://doi.org/10.8844/1mmkfn26>.

Selain persoalan fiskal, tantangan kebijakan ekonomi publik di daerah juga berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan desentralisasi fiskal. Tujuan utama desentralisasi fiskal adalah memberikan kewenangan kepada daerah agar lebih mandiri dalam mengelola pembangunan ekonomi. Akan tetapi, pada praktiknya masih terdapat daerah yang mengalami pertumbuhan ekonomi lambat meskipun telah memperoleh kewenangan fiskal yang lebih luas. Penelitian M. N. Rahman and Djasuli (2024) menunjukkan bahwa penerapan desentralisasi fiskal di Kabupaten Bangkalan memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi efektivitasnya masih dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi ekonomi lokal dan meningkatkan PAD. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah akan lebih optimal apabila pemerintah daerah mampu mengelola kebijakan fiskal secara produktif dan berorientasi pada pembangunan sektor strategis.

Tantangan lainnya adalah belum optimalnya pengelolaan aset daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan ekonomi. Banyak aset daerah yang belum dimanfaatkan secara produktif sehingga belum memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan daerah. Padahal, pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang efektif dapat menjadi instrumen penting dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah. Kumenaung and Djohansjah (2023) menjelaskan bahwa optimalisasi pemanfaatan BMD dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan penerimaan daerah pascapandemi Covid-19. Dalam penelitiannya disebutkan bahwa kerja sama pemanfaatan aset daerah dengan pihak ketiga dapat memperkuat sumber pendapatan daerah dan mendukung pembiayaan pembangunan ekonomi regional.

Di sisi lain, optimalisasi kebijakan ekonomi publik di daerah juga memerlukan penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Tata kelola pemerintahan yang baik menjadi faktor penting dalam menciptakan efektivitas kebijakan publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat maupun investor terhadap pemerintah daerah. Dalam konteks pembangunan ekonomi daerah, transparansi pengelolaan anggaran dan efisiensi birokrasi dapat meningkatkan efektivitas belanja publik serta mempercepat realisasi program pembangunan. Widodo and Sujianto (2024) menjelaskan bahwa tingkat kemandirian fiskal dan efektivitas transfer keuangan pusat menjadi faktor penting dalam meningkatkan pembangunan ekonomi daerah di Indonesia. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal akan lebih optimal apabila disertai peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan daerah dan pengawasan penggunaan anggaran secara efektif.

Optimalisasi kebijakan ekonomi publik juga dapat dilakukan melalui pengembangan inovasi daerah dan digitalisasi pelayanan publik. Transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah, pelayanan perizinan, dan administrasi perpajakan mampu meningkatkan efisiensi birokrasi serta memperkuat penerimaan daerah. Selain itu, inovasi daerah dapat membantu pemerintah menciptakan kebijakan ekonomi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Penelitian Putri, Kartini, and Akbar (2024) menjelaskan bahwa penerapan konsep entrepreneurial government dalam optimalisasi PAD sektor kesehatan di Kabupaten Karawang berhasil meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah melalui inovasi pelayanan publik dan penguatan kemitraan strategis. Penelitian tersebut menegaskan bahwa inovasi kebijakan dan pemanfaatan teknologi menjadi faktor penting dalam meningkatkan kapasitas ekonomi daerah.

Secara keseluruhan, tantangan kebijakan ekonomi publik di daerah di Indonesia masih berkaitan dengan rendahnya kemandirian fiskal, lemahnya pengelolaan aset daerah, ketimpangan kapasitas birokrasi, serta belum optimalnya tata kelola pemerintahan. Namun demikian, berbagai upaya optimalisasi dapat dilakukan melalui penguatan PAD, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, pengembangan inovasi daerah, digitalisasi pelayanan publik, dan optimalisasi pengelolaan aset daerah. Kebijakan ekonomi publik yang dirancang secara efektif dan berorientasi pada potensi lokal akan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat dipahami bahwa kebijakan ekonomi publik mempunyai peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia. Kebijakan tersebut diwujudkan melalui berbagai instrumen, seperti kebijakan fiskal daerah, desentralisasi fiskal, pembangunan infrastruktur, pengelolaan dana transfer pemerintah pusat, peningkatan investasi, serta

pengembangan ekonomi digital. Seluruh kebijakan tersebut diarahkan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat, memperluas lapangan pekerjaan, memperkuat daya saing daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Pertumbuhan ekonomi daerah tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya alam, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dan menerapkan kebijakan pembangunan secara efektif. Pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan keuangan daerah yang baik, serta dukungan terhadap UMKM dan ekonomi digital terbukti mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi regional. Selain itu, penerapan desentralisasi fiskal memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk lebih mandiri dalam menentukan kebijakan pembangunan sesuai dengan potensi dan kebutuhan wilayah masing-masing. Meskipun demikian, pelaksanaan kebijakan ekonomi publik di daerah masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya tingkat kemandirian fiskal, ketimpangan pembangunan antar daerah, lemahnya tata kelola pemerintahan, dan belum optimalnya pemanfaatan aset daerah serta pelayanan publik berbasis digital. Ketergantungan daerah terhadap bantuan dana dari pemerintah pusat juga menunjukkan bahwa kapasitas ekonomi dan fiskal setiap daerah masih belum seimbang. Oleh sebab itu, diperlukan upaya optimalisasi kebijakan ekonomi publik melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan publik, serta pengelolaan anggaran yang lebih efektif dan produktif. Kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga sangat diperlukan agar pembangunan ekonomi daerah dapat berjalan lebih inklusif, merata, dan berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat perekonomian nasional.

Referensi

1. A. F. Kusuma and A. Anwar, "Analisis ketergantungan fiskal daerah dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah," *J. Kebijak. Ekon. dan Keuang.*, vol. 2, no. 2, pp. 223–233, 2023, doi: <https://doi.org/10.20885/JKEK.vol2.iss2.art14>
2. A. F. Rahman, R. K. Sakti, and M. J. Thompson, "Fiscal Decentralization and Regional Economic Growth : Empirical Evidence from Indonesian Districts," *Econ. Note*, vol. 2, no. 1, pp. 17–23, 2026, doi: <https://doi.org/10.70716/econote.v2i1.207>.
3. A. H. Widodo and A. E. Sujianto, "Desentralisasi Fiskal terhadap Pembangunan Ekonomi di Daerah," *J. Kaji. Ekon. Bisnis Islam*, vol. 5, no. 5, pp. 3403–3408, 2024, doi: DOI: <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i5.1518>.
4. A. Kanan, K. H. P. Lambe, and S. E. Lamba, "Analisis Kebijakan Daerah dalam Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Yahukimo," *J-MEBI J. Ilm. Mhs. Ekon. dan Bisnis Indones. Vol.*, vol. 1, no. 2, pp. 27–37, 2025, doi: <https://doi.org/10.8844/1mmkfn26>.
5. A. Latifa, A. Frinaldi, L. Magriasti, and H. Naldi, "Desentralisasi Fiskal: Tantangan Pengelolaan Pengeluaran Daerah Dalam Mewujudkan Otonomi Keuangan Daerah," *J. Manaj. dan Ilmu Adm. Publik*, vol. 7, no. 3, pp. 411–417, 2025, doi: <https://doi.org/10.24036/jmiap.v7i3.1237>.
6. A. Maula and E. Prasjojo, "Interactive Governance of Regulatory Reform in the Issuing of Building Construction Permits in DKI Jakarta," *J. Kebijak. dan Adm. Publik*, vol. 25, no. 1, pp. 55–73, 2021, doi: <https://doi.org/10.22146/jkap.61291>.
7. A. P. Nugroho and A. N. Hidayat, "Jurnal Of Development Economic and Digitalization," *J. Dev. Econ. Digit.*, vol. 3, no. 2, pp. 112–128, 2024, doi: <https://doi.org/10.59664/jded.v3i2.9131>.
8. A. R. Ferrara, L. Dijkstra, P. Mccann, and R. Nistic, "The response of regional well-being to place-based policy interventions," *Reg. Sci. Urban Econ.*, vol. 97, 2022, doi: <https://doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2022.103830>
9. A. Sugandi, H. Nariyah, and Nursahidin, "Pengaruh Kebijakan Belanja Daerah terhadap Efektivitas Produk Domestik Regional Bruto dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Indramayu," *J. Pendidik. Indones.*, vol. 5, no. 12, pp. 1939–1949, 2024, doi: <https://doi.org/10.59141/japendi.v5i12.6318>.
10. A. T. Basuki, "Faktor Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah Di Indonesia," *Bul. Ekon.*, vol. 18, no. 2, pp. 121–132, 2020, doi: <https://doi.org/10.31315/be.v18i2.5601>.
11. A. V. M. Maudita and Susilo, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Daerah," *J. Dev. Econ. Soc. Stud.*, vol. 2, no. 3, pp. 570–582, 2023, doi: <http://dx.doi.org/10.21776/jdess.2023.02.3.09>.
12. Andriansyah, N. Asep, and B. Rifai, "Structural Change and Regional Economic Growth in Indonesia," *Bull. Indones. Econ. Stud.*, vol. 59, no. 11, 2023, doi: <https://doi.org/10.1080/00074918.2021.1914320>.
13. B. C. M. Putri, D. S. Kartini, and I. Akbar, "Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Berbasis Entrepreneurial Government Untuk Sektor Kesehatan di Kabupaten Karawang Tahun 2023," *J. Multidiscip. Res. Dev.*, vol. 6, no. 5, pp. 1670–1677, 2024, doi: <https://doi.org/10.38035/rj.v6i5.993>.
14. D. S. Kumenaung and A. C. Djohansjah, "Optimalisasi Pemanfaatan Bmd Sebagai Sumber Penerimaan Daerah," *J. Pembang. Ekon. dan Keuang. Drh.*, vol. 24, no. 3, pp. 351–358, 2023, doi: <https://doi.org/10.35794/jpek.d.50001.24.3.2023>.
15. F. Ferdian and A. Satrianto, "Pengaruh Infrastruktur Ekonomi, Sosial Dan Foreign Direct Investment Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia," *J. Pembangunan Ekon. dan Keuang. Drh.*, vol. 23, no. 1, pp. 73–93, 2022, doi: DOI: <https://doi.org/10.35794/jpek.d.41486.23.1.2022>.
16. F. Prasetya, "Kualitas Pemerintahan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Jawa Timur," *J. Kaji. Ekon. Keuang.*, vol. 5, no. 1, 2021, doi: <https://doi.org/10.31685/kek.v5i1.581>.
17. H. Riofita, "Augmenting Islamic Digital Payment Effect On Muslim Customer Purchase Decision On Micro, Small And Medium Enterprises" (Msmes) Products," *J. Islam. Monet. Econ. Financ.*, vol. 10, no. 4, pp. 735–758, 2024, doi: <https://doi.org/10.21098/jimf.v10i4.1991>.
18. H. Riofita, "Developing Digital Empowerment Programs to Enhance the Marketing Performance of Private Islamic Higher Education Institutions," *Muslim Bus. Econ. Rev.*, vol. 1, no. 2, pp. 257–280, 2022, doi: <https://doi.org/10.21098/jimf.v10i4.1991>.
19. H. Riofita, "Perceived Opportunity and Risk Control Role on Willingness to Recommend Sharia Fintech," *J. Ekon. Indones.*, vol. 13, no. 2, pp. 137–151, 2024, doi: <https://doi.org/10.52813/jei.v13i2.353>.
20. K. Abdillah, A. Maulana, and Aminatuzuhro, "Determinants of Indonesia ' s Regional Economic Growth During The Era of Regional Autonomy," *J. Ekon. Pembang.*, vol. 21, no. 02, pp. 115–129, 2023, doi: <https://doi.org/10.22219/jep.v21i02.27934>.

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.9038>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

21. K. D. Saputri and C. F. Ananda, "Pengaruh Belanja Daerah, Pmdn, Dan Pma Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Pulau Jawa," *J. Dev. Econ. Soc. Stud.*, vol. 2, no. 4, pp. 800–813, 2023, doi: <http://dx.doi.org/10.21776/jdess.2023.02.4.08>.
22. M. I. Luthfi, A. Bashir, and S. Sukanto, "Identifikasi pengaruh infrastruktur publik dan ketimpangan pendapatan per kapita terhadap pertumbuhan ekonomi di Wilayah Sumbagsel tahun 2013-2022," *J. Kebijakan. Ekon. dan Keuang.*, vol. 3, no. 2, pp. 235–242, 2024, doi: <https://doi.org/10.20885/JKEK.vol3.iss2.art14>
23. M. N. Rahman and M. Djasuli, "Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Kabupaten Bangkalan," *J. Akunt. Dan Keuang. Syariah*, vol. 7, no. 1, pp. 122–128, 2024, doi: <https://doi.org/10.54712/aliansi.v7i1.311>.
24. M. P. Todaro and S. C. Smith, *Pembangunan Ekonomi*. United Kingdom: Penerbit Erlangga, 2006.
25. M. Sa'diah and K. Khoirunurrofik, "The Relationship Between Special Economic Zones And Economic Growth And Welfare : Empirical Evidence From Regencies And Cities In Indonesia," *Indones. Treas. Rev.*, vol. 10, no. 2, pp. 173–187, 2025, doi: <https://doi.org/10.33105/itrev.v10i2.1098>.
26. N. I. A. Nabila, A. Rahim, S. Astuty, Irwandi, and Regina, "Estimasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi: Analisis Data Panel Pada Tiga Provinsi Di Indonesia Tahun 2010-2024," *Bull. Econ. Stud.*, vol. 5, no. 3, pp. 223–237, 2025, doi: <https://doi.org/10.24252/best.v5i3.63054>.
27. R. Alvaro, "Analisis Determinasi Derajat Desentralisasi Fiskal Dan Kemandirian Keuangan Daerah Di Indonesia," *J. Budg.*, vol. 5, no. 1, pp. 130–152, 2020, doi: <https://doi.org/10.22212/jbudget.v5i1.59>.
28. R. Ihwandi and Khoirunurrofik, "Regional Financial Performance and Inclusive Economic Development," *J. Bina Praja J. Home Aff. Gov.*, vol. 15, no. 2, pp. 417–429, 2023, doi: <https://doi.org/10.21787/jbp.15.2023.417-429>
29. T. A. Prasetyo and A. Dinarjito, "Analisis Pengaruh Dana Desa Dan Indeks Pembangunan Manusia Per Kabupaten Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Di Indonesia Dengan Pembagian Wilayah Sebagai Variabel Kontrol," *Perbendaharaan, Keuang. Negara Dan Kebijakan. Publik*, vol. 6, no. 4, pp. 375–391, 2021, doi: <https://doi.org/10.33105/itrev.v6i4.336>.
30. W. . Duun, *Public Policy Analisis*. New York: Routledge, 2016.